BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi di Indonesia telah memasuki masa pemulihan dan membuka jalan bagi munculnya reformasi total di segala bidang. Upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi yaitu dengan mengembalikan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia dengan mencoba mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Arie Soelendro (2000:13) berpendapat, unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*. Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme dan semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah. Sehingga, pemerintah sebagai pelaku utama dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih akurat.

Otonomi daerah merupakan salah satu jawaban dan amanat reformasi dalam pembangunan negara, memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan negara yang mampu dimobilisasi dengan efektif dan efisien khususnya sumber daya keuangan untuk membiayai aktifitas penyelenggaraan negara. Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini

dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan daerah pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Maka pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang selalu kita kenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sebagai rencana keuangan tahunan, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Peraturan Pemerintah No.108/2000 tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah menyarankan agar setiap akhir tahun anggaran, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan

perhitungan APBD, norma perhitungan APBD, laporan arus kas, dan neraca daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada pasal 31 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa laporan realisasi anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja perangkat daerah (Nugrahani, 2007).

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Suatu organinsasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan

praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga bisa dipantau dan dievaluasi pelaksanaan kinerja dan dibandingkan dengan rencana kerja serta dilakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya. Akuntabilitas bukan hanya untuk menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan. Akan tetapi, akuntabilitas yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang publik itu dibelanjakan secara ekonomi, efisien, dan efektif. Semakin lama organisasi sektor publik kian pesat perkembangannya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut mengakibatkan munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparasi dari pemerintah. Selain itu, timbul tuntutan baru yaitu agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Value for money adalah metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik. Dalam pengelolaan sektor publik, *value for money* mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efesiensi, dan efektivitas. Pendekatan *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja dan akuntabilitas

sehingga efektivitas pelayanan publik dapat meningkat dalam arti pelayanan tepat sasaran, biaya pelayanan publik menurun dan penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik dapat meningkat.

Anggaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang terbatas. Hal ini tentunya membuat pemerintah daerah kabupaten Tulungagung berkeinginan menjadikan pemerintahan yang akuntabel atau transparan. Di sisi lain, hasil survey pada 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa terdapat beberapa anggaran yang penggunaannya tidak jelas dan belum maksimal, Jatimtimes (2017). Dengan demikian tuntutan masyarakat mengharapkan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Faktor *Value for Money* Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung ekonomis pada tahun 2015-2017 ?
2. Apakah akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung efisien pada tahun 2015-2017 ?

3. Apakah akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung efektif pada tahun 2015-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir perkuliahan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Sebagai salah satu perwujudan tri darma perguruan tinggi dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta untuk mendapat pengalaman praktis dalam penelitian.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2017 berdasarkan rasio ekonomi.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2017 berdasarkan rasio efisiensi.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2017 berdasarkan rasio efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.4.1 Bagi Universitas

1. Sebagai bahan referensi atau dokumentasi guna melengkapi perbendaharaan buku perpustakaan apabila dibutuhkan dikemudian hari.

2. Menjadi informasi dan referensi ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang ingin melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.4.2 Bagi Peneliti

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai *Value for Money* dan menambah wawasan kepada penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh pada saat perkuliahan.
2. Sebagai pemahaman bahwa akuntabilitas keuangan sangat dibutuhkan semua sektor publik atau instansi terutama yang dampaknya sangat tinggi terhadap lingkungan, sosial, ekonomi dan lain – lain.
3. Dapat digunakan sebagai sumber yang tepat untuk belajar bagaimana cara mengetahui akuntabilitas keuangan organisasi sektor publik dan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari diperkuliahan.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Dapat menjadi acuan dan gambaran tentang bagaimana faktor *value for money* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten Tulungagung.
2. Menjadi bahan masukan supaya instansi ini dapat berjalan lebih baik kedepannya.